

05 Tata Kelola & Manajemen Risiko

Laporan Tahun 2024

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Madani

Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola

Sebagai Lembaga keuangan kepercayaan, BPRS Artha Madani memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam operasional dan pengelolaan BPRS. Hal ini merupakan faktor sangat penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat dan pemegang saham. Tata Kelola yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, dalam mengelola bank dan terus berupaya meningkatkan, konsisten dan berkelanjutan dalam implementasi dari prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS Artha Madani telah melakukan Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 dengan nilai Komposit 1,1 atau berada di peringkat 1. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan Kebijakan sudah lengkap berdasarkan POJK Tata Kelola
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan.
3. Bank telah memiliki pedoman tata tertib bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
4. Dewan Komisaris dan DPS secara rutin mengadakan rapat guna pengawasan terhadap kinerja Keuangan dan Bisnis proses, serta penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Prinsip syariah di BPRS.
5. Tidak adanya penyimpangan internal (Internal Fraud), Permasalahan Hukum baik perdata maupun pidana serta Transaksi Benturan Kepentingan selama tahun 2024.
6. Penerapan fungsi kepatuhan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan budaya kepatuhan pada setiap pelaksana dan atasan langsung agar tidak terjadi hasil temuan audit yang bersifat materiil maupun administratif.
7. Penerapan fungsi Audit intern sudah baik telah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman audit yang telah disusun oleh BPRS.
8. Kantor Audit Publik telah melaksanakan audit secara independent sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Tidak ada pelanggaran dan pelanggaran BMPD selama 2024

Tata Kelola

✓ Penerapan Tata Kelola

11. Bank telah menyusun dan melaporkan Rencana Bisnis Bank kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan.
13. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas dalam rangka transparansi keuangan dan non keuangan dan laporan tata Kelola telah dipublikasikan pada website bank, yakni www.arthamadani.co.id dan disampaikan juga kepada Asosiasi.

✓ HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi adalah hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara sesama direksi, komisaris, pengawas syariah, antara anggota dewan direksi dengan anggota dewan komisaris, dan antara anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan pemegang saham.

Hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi dan pemegang saham dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Afiliasi			
		Dekom	DPS	Direksi	Pemegang Saham
Rendy Permana	Komisaris Utama	X	X	X	V
Tatang Hidayat	Komisaris	X	X	X	X
Syamsul Falah	Pengawas Syariah	X	X	X	X
Ahmad Nuryadi Asmawi	Pengawas Syariah	X	X	X	X
Cahyo Kartiko	Direktur Utama	X	X	X	X
Tian Purnama Pajar	Direktur Operasional	X	X	X	X
Diana Fitriani	Direktur Bisnis	X	X	X	X

Tata Kelola

✓ KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, KOMISARIS DAN PENGAWAS SYARIAH

Sejalan dengan aspek keterbukaan, kepemilikan saham Direksi, Komisaris dan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Artha Madani per Desember 2024 diungkapkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Rp. Kepemilikan	% Kepemilikan
Rendy Permana	Komisaris Utama	19.832	1.983.200.000	10.98%
Tatang Hidayat	Komisaris	-	-	
Syamsul Falah	Pengawas Syariah	-	-	
Ahmad Nuryadi Asmawi	Pengawas Syariah	-	-	
Cahyo Kartiko	Direktur Utama	8.264	826.400.000	4,58%
Tian Purnama Pajar	Direktur Operasional	-	-	

✓ PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diterima selama satu tahun pada 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi:						
Gaji	2	1.032.932.544	2	950.742.276	2	403.792.944
Tunjangan	2	454.642.179	2	371.768.030	2	87.504.108
Tantiem	2	117.627.712	2	79.228.523	2	33.649.412
Bonus	2	0	2	0	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	2	0
Remunerasi-Lainnya	2	0	2	0	2	0
Total Remunerasi		1.605.202.435		1.401.738.829		524.946.464
Fasilitas Lain:						
Perumahan	2	0	2	0	2	0
Transportasi	2	88.064.649	2	0	2	0
Kesehatan	2	91.813.161	2	47.090.784	2	15.568.164
Fasilitas Lain-Lainnya	2	149.939.851	2	148.070.720	2	44.112.260
Total Fasilitas Lain		329.817.661		195.161.504		59.680.424
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.935.020.096		1.596.900.333		584.626.888

Tata Kelola

✓ RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Deskripsi	Perbandingan
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.69
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.51
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.36
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	3.65
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.88
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.32

✓ RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan empat rapat Dewan Komisaris sebagai upaya pengawasan dengan topik pembahasan meliputi kinerja keuangan, implementasi rencana kerja, pengelolaan risiko dan isu-isu penting lainnya yang mempengaruhi jalannya perusahaan.

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Online/Offline	Kehadiran Dewan Komisaris
20240205	1. Review Notulensi Rapat sebelumnya 2. Review Kinerja Keuangan Triwulan IV tahun 2023 3. Evaluasi hasil temuan audit intern 4. Evaluasi Perkembangan Proyek Pembiayaan Sindikasi. 5. Evaluasi Pembiayaan PPRS Seluruh Kantor dan Pengelolaan Angsurannya. 6. Evaluasi Pembiayaan Relaksasi dan penyelesaian AYDA	Offline	Lengkap
20240507	1. Review Notulensi Rapat sebelumnya 2. Review Kinerja Keuangan Triwulan I tahun 2024 3. Evaluasi Penerapan APU PPT 4. Evaluasi Program SDI (Rekrutmen, Kontrak Kerja, Pendidikan dan Pelatihan Karyawan) 5. Pemaparan tentang Developer bermasalah dan Penyelesaiannya	Offline	Lengkap
20240709	1. Review Notulensi Rapat sebelumnya 2. Review Kinerja Keuangan Semester I tahun 2024 3. Pemaparan proses pengikatan dan legalitas Proyek 4. Evaluasi Pembiayaan PPRS	Offline	Lengkap
20241028	1. Review Notulensi Rapat sebelumnya 2. Evaluasi dan Rencana Tindak Penyelesaian Hasil Pemeriksaan OJK terkait Operasional dan Legal	Offline	Lengkap

Tata Kelola

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selain melakukan pemeriksaan secara uji petik, sepanjang tahun 2024 telah dilakukan lima rapat Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan opini Dewan Pengawas Syariah atas permasalahan yang diajukan Direksi.

Tgl Rapat	Agenda Rapat	Online/ Offline	Kehadiran Dewan komisaris
20240319	a. Pembahasan mengenai formulir akad pembiayaan b. Opini Syariah terkait Pengakuan Dana Titipan Angsuran NN (no name) menjadi Pendapatan Operasional	Offline	Lengkap
20240425	Opini syariah terkait pengenaan Denda dan bagi hasil Pencairan Bagi Hasil Jatuh Tempo	Offline	Lengkap
20240529	Pembahasan mengenai Ketentuan dan prosedur Produk CWLD dan Opini syariah mengenai produk CWLD	Offline	Lengkap
20240719	a. Opini syariah terkait Akad Ijarah Mutijasa untuk Pembiayaan UKM kepada Developer. b. Opini syariah terkait sumber dana kegiatan CSR Bank. c. Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah pada Semester I tahun 2024	Offline	Lengkap
20240820	Opni Syariah terkait Pembiayaan Qardh Buyback Developer	Offline	Lengkap

Manajemen Risiko

✓ KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting mengingat aktivitas BPRS Artha Madani sebagai Lembaga intermediasi memiliki risiko yang sangat besar. Kebijakan Manajemen Risiko BPRS Artha Madani yang akan disusun mengatur terkait:

- Ruang lingkup dan tujuan manajemen risiko;
- Klasifikasi dan definisi risiko;
- Model bisnis dan toleransi terhadap risiko;
- Organisasi manajemen risiko;
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing organ pada organisasi manajemen risiko;
- Peran audit internal

Secara spesifik BPRS Artha Madani juga akan menetapkan kebijakan risiko likuiditas yang dituangkan yang didalamnya mengatur terkait:

- Organisasi pengelolaan risiko likuiditas
- Pengukuran likuiditas
- Kebijakan pengelolaan kebutuhan dana
- Kebijakan pengelolaan penempatan dana

BPRS Artha Madani telah menyusun kebijakan pembiayaan manajemen risiko pembiayaan dan manajemen risiko operasional yang akan disahkan pada bulan Juni 2022 yang disetujui oleh Komisaris Utama dan telah dilaporkan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan.

✓ ORGANISASI & TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan POJK mengenai Manajemen Risiko dan Tata Kelola, BPRS Artha Madani termasuk dalam kategori BPRS dengan Modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bank telah memiliki struktur organisasi yang lengkap sesuai ketentuan yaitu terdiri dari:

1. Direksi:
 - Direktur Utama
 - Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama
 - Komisaris
3. 2 Anggota Dewan Pengawas Syariah
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
5. Pejabat Eksekutif Audit Internal

Dalam hal ini pelaksanaan pelaporan dan koordinasi terkait hal yang berhubungan dengan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pejabat Eksekutif terkait bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional yang membawahkan fungsi Kepatuhan terkait.

Manajemen Risiko

✓ PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan POJK No. 23/POJK.03/2018 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS, maka dalam penerapannya telah melakukan:

1. Laporan Profil Risiko Semester I dan Semester II tahun 2024 atas 4 Risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) pada bulan Juli 2024 dan Januari 2025

Adapun laporan profil risiko pada Semester II Tahun 2024 sebagai berikut:

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		1	30,00	0,30		1	30,00	0,30
Rentabilitas		4	15,00	0,60		5	15,00	0,75
ROA	0,02	5			0,31	5		
BOPO	99,83	4			97,38	4		
Net Imbalan	4,13	4			3,43	5		
Permodalan		1	30,00	0,30		3	30,00	0,90
KPMM	16,21	1			12,81	3		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	277,57	1			240,47	1		
Nilai Komposit				1,70				2,45
Peringkat Komposit				2				2

**Unaudited*

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan:

Tingkat Kesehatan, Mencerminkan bank yang secara umum cukup sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor Eksternal Lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola dan permodalan, yang secara umum baik. Namun pada rentabilitas bank masih di peringkat 4 sehingga bank harus terus menguayakan tindakan lanjut penyelesaian pembiayaan menunggak dan pembiayaan bermasalah guna meningkatkan pendapatan margin.

Analisis Profil Risiko:

Profil Risiko, Berdasarkan hasil penilaian risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas pada Semester II tahun 2024 secara umum rendah. Namun ada perhatian khusus terhadap kenaikan kolektibilitas 2 pada pembiayaan dan rasio likuiditas yang minim. Untuk itu Bank akan berfokus untuk melakukan perbaikan pada sisi performa pembiayaan, sedangkan untuk likuiditas bank terus berupaya menghimpun dana masyarakat dengan memasarkan produk-produk unggulan bank dan menurunkan antar bank passiva.

Manajemen Risiko



PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Analisis Tata Kelola:

Tata Kelola, BPRS Artha Madani telah memiliki struktur organisasi yang lengkap, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan DPS, Kecukupan kebijakan dan prosedur yang dimiliki serta SDM yang memadai. Bank terus berupaya peningkatan kualitas SDM, pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pengembangan sistem teknologi informasi baik corebanking maupun sistem pendukung untuk menghasilkan data dan laporan yang tepat, cepat dan akurat berdasarkan standar yang berlaku dan dapat mendukung kinerja bisnis maupun operasional bank.

Analisis Rentabilitas:

Rentabilitas, Perolehan laba sampai dengan akhir Semester II 2024 masih belum sesuai dengan rencana bisnis bank. Kenaikan biaya operasional bank tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dari margin pembiayaan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan yang diterima oleh bank.

Analisis Permodalan:

Permodalan, Pada Oktober 2024 bank telah melakukan penambahan modal dan masih dalam proses persetujuan OJK sehingga total modal disetor sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp. 21 miliar, hal ini diharapkan dapat memperkuat permodalan bank.